

PEREFLEKSIAN NILAI LUHUR PANCASILA DALAM BEBERAPA JENJANG KEHIDUPAN PARA AKUNTAN

Rendy Mirwan Aspirandi
Universitas Brawijaya, JL. MT. Haryono 165 Malang

ABSTRACT

Pancasila was consisted from five important point. Although only five points but the value was contained very broad. This article will discuss a bit about understanding the noble values of Pancasila to the accounting profession. According with these objectives, the article takes a few levels from the accountants to give his opinion on the meaning of each item value of Pancasila.

All of informant are very agree for implementing the value of Pancasila on many accountant profession level. Because it will strengthen ethical and morals conduct. So that not only promote personal interests but also more generally in the public interest.

Key Word: Divinity, Humanity, Unity, Wisdom, and Justness

ABSTRAK

Pancasila Terdiri dari lima butir poin penting. Meskipun hanya lima butir tetapi nilai yang terkandung didalamnya sangat luas sekali. Artikel ini akan sedikit membahas mengenai pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila terhadap profesi akuntan. Sesuai dengan tujuan tersebut maka artikel ini mengambil beberapa jenjang dari para akuntan untuk memberikan pendapatnya pada pemaknaan setiap butir dari nilai Pancasila.

Semua informan sangat setuju untuk memasukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila ke dalam berbagai jenjang profesi akuntan. Hal ini dikarenakan nilai Pancasila akan memperkokoh perbuatan yang beretika dan bermoral tinggi. Sehingga tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kebijaksanaan, dan Keadilan

PENDAHULUAN

“Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kalimat tersebut mengingatkan kita semua akan kehidupan di masa SD (Sekolah Dasar) kita sewaktu kita diberikan tugas untuk menghafalkan butir-butir Pancasila di dalam kelas. Suasana *nan* elok dan damai saat itu membuat kita semua dapat menghafalkan butir-butir Pancasila tersebut dengan cepat. Semua siswa di dalam kelas diharuskan untuk menghafalkan butir-butir Pancasila tersebut dan diperkenankan untuk maju satu persatu untuk menguji penghafalan

butir-butir Pancasila tersebut. Bagi siswa yang tidak hafal akan butir-butir Pancasila tersebut maka akan diberi nilai jelek dalam mata pelajaran tersebut. Jika kita timbang dengan seksama sebenarnya pelaksanaan metode pembelajaran seperti ini memang sedikit ada unsur pemaksaan kepada para siswanya, tetapi disisi lain maksud dan tujuan diadakan pembelajaran seperti ini sangat baik sekali. Karena dengan metode pembelajaran seperti ini maka siswa akan lebih serius dalam menghafalkan butir-butir Pancasila tersebut. Keharusan ini sangat berguna bagi kehidupan siswa dimasa yang akan datang sebab Pancasila merupakan dasar atau falsafah kehidupan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita junjung tinggi sebagai warga negaranya.

Fenomena yang saat ini terjadi adalah banyaknya generasi muda mulai melupakan butir-butir yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Kita bisa ambil satu contoh saja ketika seorang siswa SD (Sekolah Dasar) saat ini ditanya mengenai butir-butir Pancasila. Kebanyakan para siswa tidak lancar dalam menyebutkan butir-butir Pancasila tersebut dan bahkan ada sebagian siswa yang tidak menghafalnya. Keadaan ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat *krusial* bahwa siapa yang dapat dipersalahkan dari keadaan seperti ini? Apakah gurunya atau sistem dalam kurikulum atau bahkan memang siswanya yang enggan untuk menghafalkan butir-butir Pancasila tersebut. Berbagai pertanyaan tersebut memang sangat fundamental sekali dalam menjelaskan keadaan yang tidak semestinya terjadi seperti ini. Pancasila yang dinilai sebagai nilai luhur bangsa seharusnya harus diresapi oleh semua warga negara Indonesia, *tak* terkecuali anak sekolah atau bahkan warga negara yang telah lanjut usia. Hal ini sangat berarti bagi kehidupan setiap warga negara karena nilai luhur Pancasila dapat dijadikan pegangan atau landasan kehidupan setiap warga negara dalam beraktivitas setiap harinya dan dalam berinteraksi dengan sesama warga lainnya baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Seperti yang *dilansir* dalam situs *ketinggalan.files.wordpress.com/2010/11/pengertian-pancasila.pdf* yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, karena unsur-unsurnya telah berabad-abad lamanya terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang sekaligus merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) antara lain : “Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia

yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam kehidupan lahir batin yang makin baik, dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang telah diuji kebenarannya, kemampuan dan kesaktiannya sehingga tidak ada suatu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia”. Pernyataan tersebut sudah jelas menekankan bahwa Pancasila sangat kuat artinya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya membuat pesimis bahwa pada kehidupan selanjutnya yaitu di dunia kerja, generasi penerus bangsa ini akan benar-benar tidak menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan dalam pekerjaannya. Hal ini sangat tidak dapat dihindarkan dan harap dimaklumi jika saat ini tindak korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merajalela di negara Indonesia. Karena memang tidak ada landasan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan kehidupan bersosial justru saat ini telah beralih pandangan liberalisme dan kapitalisme yang lebih individualis dan mementingkan kekayaannya sendiri. Pandangan yang lebih berperspektif pada nilai rupiah yang dapat mengayakan dirinya sendiri tetapi mengesampingkan kepentingan bersama. Pandangan seperti ini sangat berbahaya sekali kalau dapat kita rasakan, karena kehidupan seperti ini akan merusak lingkungan sosial tempat dia tinggal saat ini, yang menjadi tumpuannya hanya memperkaya dirinya sendiri. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Mulawarman (2010) liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya, tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat

dilihat dari pandangan Nugroho (2001) dalam Mulawarman (2010) mengenai paham liberal, yang menurutnya lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi) cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area *privat sphere*. Hal ini sangat tidak sejalan dengan nilai pancasila yang dirasakan.

Falsafah kehidupan yang dimiliki oleh Pancasila ini juga harus diadopsi didalam ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi akan kehilangan *ruh* kebangsaan Indonesia yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebersamaan dan memakmurkan seluruh warga negara Indonesia, jika tidak berlandaskan pada Pancasila. Kehilangan ini berakibat pada tindakan yang semena-mena dilakukan oleh akuntan di Indonesia tanpa memikirkan dari dampak yang diakibatkan dari tindakannya tersebut. Seperti halnya dengan melakukan korupsi atau melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Tindakan seperti ini akan memperburuk citra para akuntan diseluruh dunai khususnya di Indonesia. Dampak yang lebih buruk lagi adalah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi pada umumnya. Dengan menelaah fenomena yang sebelumnya maka artikel ini akan mencoba membuktikan mengenai pemahaman nilai-nilai luhur pancasila dalam beberapa jenjang kehidupan yang memiliki latar belakang ilmu akuntansi yang ada di Indonesia. Apakah pemahaman terhadap pancasila sangat mendalam atau bahkan tidak mengetahui hubungan antara pancasila dengan ilmu akuntansi yang telah dipelajarinya. Pembuktian ini akan menunjukkan baik kepada para akademisi maupun praktisi mengenai arti pentingnya kita dalam menerapkan nilai-nilai luhur pancasila dalam setiap segi aktivitas akuntan dalam melaksanakan profesinya

baik berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan sang penciptanya.

HASIL

Pernyataan yang disampaikan Moerdiono (1995/1996) dalam Mulyono (n.d) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut.

Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Ketiga nilai ini harus dapat menjadi landasan bagi setiap tindakan para akuntan dalam menjalankan profesinya, supaya tindakan yang dilakukan oleh para akuntan lebih memiliki makna etika dan spiritualitas di dalamnya.

Etika harus diterapkan kepada jiwa setiap akuntan supaya setiap tindakan yang dilakukannya akan menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan bersama. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Arief Sidharta (2003:1) dalam Nuraini (2006: 4) bahwa etika sebagai sebuah disiplin kefilosofan akan menjelaskan mengapa perbuatan harus dilakukan dan apa yang menjadikan patokan sebagai dasar bagi pilihan tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Patokan ini akan muncul dalam nurani serta akal budi manusia dan berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradapan, dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Sikap yang penuh dengan etika menunjukkan sikap yang benar dan berwibawa. Kencana Syafie (1993) dalam Rahmatullah (2008: 35) menyatakan bahwa Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti

watak, adat ataupun kesucilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesucilaan. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Kattsoff (1986) dalam Rahmatullah (2008: 35) juga menyampaikan bahwa Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa etika sangat penting dalam memberikan arah kepada setiap insan untuk menjadi pribadi yang super dan religius dalam berinteraksi berkehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yoney saat perkuliahan etika profesi dan spiritualitas bahwa sebenarnya setiap insan manusia secara tidak sadar telah diberikan hati nurani oleh Allah SWT. untuk menilai bahwa tindakan yang dilakukan sudah menjunjung nilai-nilai kebenaran atau belum. Hati nurani sebenarnya adalah jantung, menurut penelitian para ahli struktur otot jantung ada beberapa yang identik dengan jaringan yang ada di otak. Sehingga jika kita bertindak sebenarnya yang merasakan dan menilai adalah jantung ini baru dimaknai oleh otak kita. Hati nurani ini terkadang dikalahkan oleh logika yang ada dalam pikiran setiap insan manusia. Sehingga diperlukannya suatu kebiasaan menumbuhkan hati nurani dalam setiap tindakan yang diambil oleh setiap insan. Pernyataan tersebut membuat mahasiswa satu kelas berpikir dan mengguguk kepala bahwa setuju akan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yoney tersebut. Jika lebih dirasakan dan dicermati lagi memang benar bahwa setiap tingkahlaku yang kita lakukan akan dirasakan oleh hati nurani kita. Setiap tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, maka jantung kita pasti akan berdebar secara tidak kita sadari. Begitu pun bagi kehidupan setiap akuntan, maka akan juga menilai setiap tindakan yang

dilakukan dengan hati nurani, baik dalam menyiapkan laporan keuangan maupun dalam aktivitas lainnya.

Artikel ini mengangkat fenomena di berbagai jenjang kehidupan akuntan baik yang telah mendapatkan pekerjaan maupun yang masih dalam pencarian pekerjaan. Artikel ini menggunakan metode wawancara dalam memberikan bukti mengenai pendapat para informan mengenai pererefleksian kehidupan dengan nilai luhur pancasila. Para informan rata-rata merupakan lulusan *freshgraduate* dari Universitas Jember yang telah masuk dalam jenjang lanjutan. Pembahasan akan dibagi dalam setiap butir pancasila yang ditelaah secara lebih mendalam.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Rahmatullah (2008: 43) menyatakan bahwa sila pertama pancasila memiliki nilai religius, yaitu nilai yang menempati nominasi tertinggi jika dibandingkan dengan sila yang lainnya. Sila pertama ini erat kaitannya dengan nilai Tuhan yang maha Agung, Maha Suci, dan absolut. Ludigdo (n.d.) menyebutkan bahwa Nilai-nilai ketuhanan merupakan sumber moralitas dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) bagi Bangsa Indonesia. Ini sudah merupakan kenyataan hakiki dalam mana Tuhan telah “hadir” dalam relung jiwa manusia Indonesia sejak lampau, meski usaha-usaha untuk mencerabutnya terus menerus dilakukan oleh para kolonialis. Hal demikian menunjukkan bahwa sejarah panjang perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak dilandasi oleh semangat keberagaman. Komitmen ketuhanan ini dijadikan sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Ihsan sepenuhnya dapat menjadikan seseorang sebagai pribadi yang selalu berbuat baik. Dengan demikian ihsan juga bermakna suatu keadaan di mana seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Perbuatan baik ini antara lain diwujudkan dengan sifat-sifat kejujuran, kerendahhatian dan

ketulusan dalam menjalani aktifitas kehidupannya. Semua sifat ini sangat dibutuhkan pada dalam diri setiap akuntan, karena kegiatan profesi akuntan akan berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan.

Ludigdo (2012: 18) menekankan lagi bahwa Nilai-nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat dalam kehidupan individu akuntan Indonesia untuk menjalankan tugas profesi dan menuntaskan visi hidupnya. Di alam Indonesia, Tuhan dianggap mempunyai peran penting untuk mempromosikan sikap dan perilaku etis akuntan. Untuk itu akuntan harus selalu didorong untuk menjaga komitmen dirinya kepada Tuhan dan kemudian menghasilkan sikap dan perilaku menghindari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, serta sekaligus menyebarkan rahmat kepada semesta. Seharusnya dengan disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan seperti ini, akuntan Indonesia akan merealisasikan berbagai prinsip dan aturan etika lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan suatu keistimewaan sebuah sikap yang selalu didasarkan dengan nilai ketuhanan maka seluruh keadaan dimuka bumi ini akan damai dan tenteram dalam bekerjasama satu sama lainnya.

Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan memang dianggap susah dalam penerapannya secara eksplisit didalam praktek para akuntan. Seperti artikel Kamayanti (n.d.: 9) yang menyatakan bahwa Tuhan dianggap tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tuhan ada pada rasa dan keyakinan. Rasa tidak bisa dibuktikan secara empiris karena rasa dan demikian pula Tuhan bersifat subyektif dan terkait dengan individual. Ilmu sudah terkungkung pada kebenaran bahwa ia harus obyektif. Obyektivitas merupakan suatu karakter yang maskulin sedangkan rasa di sisi lain sesuatu yang subyektif. Ilmu akuntansi juga tak lepas dari

kebenaran tersebut,” saya memberikan *gesture* tanda kutip dengan tangan pada „kebenaran“. “Inilah suatu bentuk sekularisasi ilmu yaitu pemisahan Tuhan dan segala hal yang bersifat duniawi, termasuk ilmu akuntansi. Pernyataan tersebut membuktikan banyaknya akuntan kesulitan dengan pemaknaan nilai ketuhanan secara eksplisit dalam akuntansi.

Beberapa pernyataan muncul dari berbagai pihak mengenai pemaknaan nilai Pancasila dalam ilmu akuntansi. Pernyataan pertama yang disampaikan oleh Tri Susanti Wulandari, SE. (salah satu mahasiswa lulusan sarjana akuntansi Universitas Jember) yang menyatakan bahwa “Seorang akuntan harus menjunjung tinggi moral etik yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik seorang akuntan harus menjiwai nilai-nilai yang terkandung didalamnya.” Pendapat ini menggambarkan suatu persetujuan akan adanya pemaknaan nilai ketuhanan yang dimiliki Pancasila dalam penerapan secara eksplisit dalam kode etik para akuntan di Indonesia khususnya.

Pernyataan selanjutnya muncul dari Resha Dwi Ayu P.M., SE. (salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Airlangga) menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya, relevansi praktik akuntan jika dilihat dari sudut pandang butir sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan bahwa setiap akuntan yang merupakan orang yang memiliki keahlian dibidang akuntansi yang telah mendidikasikan seluruh ilmu pengetahuan akuntansi dan keterampilannya harus dapat bekerja dengan peraturan atau pedoman yang berlaku. Maksudnya adalah menjalankan semua kewajiban dan tidak melakukan larangan yang telah diatur dalam suatu pedoman ataupun aturan. Tak lupa juga bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akuntan dalam praktiknya harus sesuai dengan norma agama sesuai dengan sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dimana

setiap perbuatan yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak baik dan buruk baik untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jika ada akuntan yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diartikan bahwa dia tidak mematuhi seluruh kode etik yang telah ditetapkan. Dan ini juga dapat diartikan pula bahwa tingkat keimanan para akuntan yang menyalahgunakan praktiknya masih rendah misalnya melakukan perbuatan kecurangan, rekayasa laporan dan memanipulasi data yang tidak sesuai koridor. Karena setiap perbuatan akuntan selain mematuhi peraturan yang ada hendaknya mempertimbangkan norma agama meskipun diluar konteks dari ilmu pengetahuannya.” Pernyataan tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya para akuntan yang kurang memaknai arti pentingnya sebuah nilai ketuhanan dalam menjalankan profesinya sampai masih banyak munculnya tindak kecurangan diantara para akuntan dalam melaksanakan praktik profesinya.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ida Subaida, SE. (salah satu asisten tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Situbondo) yang menyatakan bahwa “Relevansi praktik akuntan jika dilihat dari butir sila ke 1 yaitu ketuhanan yang maha esa adalah praktik akuntan di harapkan dapat perpedoman kepada agama dan kepercayaan masing-masing akuntan masing dalam melaksanakan praktik akuntansi, baik sebagai akuntan internal yang bertugas menyajikan laporan keuangan, akuntan publik yang bertugas memeriksa, dan jenis praktik akuntansi lainnya sesuai profesi yang bersangkutan. Praktik akuntansi yang dilakukan di harapkan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya serta sejajar dengan ajaran-ajaran agama yang dipercayainya. Apalagi saat ini, telah banyak akuntan yang melanggar kode etik profesi akuntan itu sendiri, seperti tidak independen dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam penyajian informasi akuntansi. Jadi seharusnya memang dikembalikan atau diseleraskan

kembali pada sila ke 1 yaitu ketuhanan yang maha esa, agar dapat menjadi dasar dalam melakukan praktik akuntansi, sehingga pelanggaran kode etik dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi pelanggaran kode etik akuntan lagi.” Fenomena yang tidak dapat dihindari memang mengenai tindak kecurangan para akuntan yang dilakukan dalam praktiknya. Fenomena seperti ini mungkin tidak dapat dihilangkan dalam praktik para akuntan, tetapi diharapkan dengan berlandaskan dengan nilai ketuhanan yang terdapat dalam butir pancasila dapat meminimalisir terjadinya tindak-tandak yang menyimpang.

Pernyataan yang juga mendukung dijalankannya sebuah pemaknaan nilai ketuhanan dalam pancasila disampaikan oleh Diadjeng Ade Sakina, SE. (salah satu staf Departemen Purchasing PT. Nestle Indonesia) yang menyatakan bahwa “Pekerjaan saya saat ini sebagai staff bagian pembelian di PT. Nestle Indonesia yang baru saja diterima. Saya disini bertugas untuk menyiapkan segala laporan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan tersebut padanantinya akan dilaporkan kepada bagian pencatatan dalam perusahaan. Relevansi nilai dari pekerjaan saya jika dikaitkan dengan sila 1 Pancasila adalah dalam melakukan setiap pencatatan saya harus jujur dan tidak boleh melakukan manipulasi terhadap catatan dan laporan yang saya buat. Sehingga saya merasakan sebuah pemaknaan dari sila 1 pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Bahwa menunjukkan pada setiap tindakan yang saya lakukan di kantor akan diawasi oleh Allah SWT. sekecil apapun tindakan pembohongan yang saya lakukan, meskipun tidak diketahui oleh manajer saya, tetapi Tuhan akan tetap tau dan melihat setiap kesalahan yang saya lakukan. Dengan pondasi sila 1 pertama saya dapat menjadikan sebuah pegangan dalam setiap tindakan yang saya lakukan di kantor.”

Pernyataan-pernyataan sebelumnya telah memberikan sebuah

inspirasi dan motivasi kepada para akuntan bahwa nilai luhur pancasila sebagai ketuhanan sangat perlu sekali untuk diterapkan dalam setiap praktik akuntan. Karena setiap insan memiliki keyakinan bahwa akan tetap diawasi oleh Tuhannya maka setiap insan harus bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, begitu juga para akuntan. Pelaksanaan prktiknya misalnya dalam membuat sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan kenyataannya yang ada dilapangan dan tidak melakukan tindak manipulasi di dalamnya meskipun tidak diawasi oleh atasannya, tetapi memiliki sebuah keyakinan bahwa dia akan tetap diawasi oleh Tuhannya. Keyakinan sekecil apapun kesalahan yang dilakukan akan dicatat oleh Tuhannya dan kebenaran sekecil apapun yang dilakukan akan diberikan suatu rahmat dan hidayah-Nya yang sangat indah balasannya kelak.

Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ini menunjukkan suatu pemaknaan manusia yang memiliki sifat keadilan dan keberadapan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sesuai dengan pernyataan Hanapih (2002: 5) bahwa Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan Negara ber-HAM (kemanusiaan), Negara ber-Hukum (yang adil), dan Negara ber-Budaya (yang beradab). Sebagai negara yang ber-HAM, NKRI ingin mengembangkan dirinya sebagai negara yang melindungi dan menegakkan HAM bagi warga negaranya. HAM dimaksud adalah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Contoh, karena hukum positif Indonesia bersumber pada Ketuhanan Yang Mahaesa, maka HAM seperti euthanasia (seperti di Selandia Baru, Belanda) atau aborsi (seperti di Irlandia Utara dan Skotlandia) tidak bisa diundang-undangkan (tidak bisa dijadikan hukum positif di Indonesia). Sebagai negara yang ber-Hukum, NKRI ingin melindungi dan mengembangkan: (1) supremasi hukum, (2) persamaan di muka hukum, (3) menegakkan HAM,

dan (4) membudayakan kontrol publik/sosial/masyarakat atas jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Sebagai negara yang ber-Budaya/Adab, NKRI ingin mengembangkan: (1) cipta, yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) karsa, yang dapat melahirkan moral dan etika, (3) rasa, yang dapat melahirkan seni dan estetika, serta (4) karya, yang dapat melahirkan karya-karya monumental dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana diketahui, keempatnya itu merupakan unsur dari budaya/adab. Sehingga dengan pembentukan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan penghayatan oleh para akuntan yang berbudaya luhur yaitu budaya nasionalisme bangsa Indonesia untuk maju bersama dan makmur secara bersama-sama dan menegsampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat secara luas.

Pendapat muncul dari Tri Susanti Wulandari, SE. (salah satu mahasiswa lulusan sarjana akuntansi Universitas Jember) yang menyatakan bahwa “Dalam sila kedua, seorang akuntan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab memiliki arti bahwa seorang akuntan dituntut agar memiliki kesadaran sikap maupun moral yang didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang baik untuk dirinya dan juga lingkungan disekitarnya.” Kebersamaan merupakan hal yang terpenting dalam berkehidupan berbangsa dan bertanah air, karena dengan adanya kebersamaan maka akan dapat merasakan nilai kehidupan satu sama lainnya dan ikut merasakan sebuah kepedihan mungkin yang dirasakan ketika seorang akuntan melakukan sebuah tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama.

Pendapat lainnya yang disampaikan oleh Resha Dwi Ayu P.M., SE. (salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Airlangga) yang menyatakan bahwa “Menurut

pendapat saya, relevansi praktik akuntan jika dilihat dari sudut pandang butir sila ke-2 yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maksudnya adalah di dalam praktik akuntansi hendaknya para akuntan harus bisa bekerja secara profesional, berintegritas tinggi dan tidak mengurangi sifat independensinya dimana harus menjunjung tinggi keadilan tanpa harus memihak pada siapapun apalagi jika didalam perbuatan praktik akuntansi menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan kecurangan untuk satu kepentingan pihak. Harus dapat menjaga nama baik Kantor Jasa Akuntan yang menaungi praktiknya, jika dikaitkan dengan rasa belas kasihan maka harus dapat dipikirkan secara matang dampak positif dan negatif atas perbuatan yang dilakukan.” Sebuah integritas dan independensi sangat penting untuk ditumbuhkan dalam jiwa para akuntan sehingga dia dapat melaksanakan praktiknya sesuai dengan kemaslahatan kemanusiaan secara luas. Seorang akuntan yang berintegritas akan selalu memegang komitmennya untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam setiap tindakannya. Kejujuran dan keadilan akan melahirkan tindakan yang lebih memiliki etika dalam pelaksanaannya.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ida Subaida, SE. (salah satu asisten tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Situbondo) yang menyatakan bahwa “Relevansi pada butir ini misalnya tercermin dalam praktik akuntan publik dalam pemberian opini. Karena biasanya antara akuntan publik dan akuntan intern dari perusahaan klien sering berhubungan secara langsung selama proses audit, bagaimana caranya agar hal-hal diluar praktik akuntansi, jangan sampai mempengaruhi pemberian opini. Misalnya seandainya dalam pemberian pelayanan dilapangan perusahaan klien pernah berbuat kesalahan diluar praktik akuntansi yang tidak disengaja seperti perlakuan yang kurang istimewa. Hal tersebut jangan sampai mempengaruhi pemberian opini audit, yang sebenarnya

wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dengan pengecualian. Jadi akuntan tetap harus mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan profesi, kepentingan organisasi, dan kepentingan umum lainnya diatas kepentingan diri sendiri.” Pengutamaan kepentingan umum juga merupakan sikap dari seorang akuntan yang berintegritas. Sikap yang menunjukkan keprofesionalan seorang akuntan harus dikedepankan demi melayani kepentingan publik.

Pernyataan juga disampaikan oleh Diajeng Ade Sakina, SE. (salah satu staf Departemen Purchasing PT. Nestle Indonesia) yang menyatakan bahwa “Sila 2 pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradap, jika direlevansikan dengan pekerjaan saya memiliki makna bahwa dalam setiap berhubungan dengan sesama karyawan dikantor hendaknya kita melakukan keadilan dalam berbagai jenjang pekerja. Baik itu buruh maupun direktur. Saya akan dapat merasakan sebuah ketidakadilan ketika para manajer atas memerintahkan target perusahaan yang menurut saya tidak logis kepada para marketing untuk melaksanakan penjualan produk. Banyak juga karyawan bagian marketing yang mengeluh kepada saya mengenai keadaan tersebut. Diharapkan dengan berlandaskan dengan sila 2 pancasila ini tindakan para manajer atas lebih bermanusiawi kepada para pekerjanya. Selain itu juga beberapa yang dapat direfleksikan dengan pekerjaan saya adalah ketika saya meminta data pembelian kepada para pelaksana pembelian, saya juga harus menerapkan tindakan tidak membedakan antara pekerja satu dengan yanglainnya. Sehingga tidak akan ada pilih kasih diantara pekerja yang satu dengan yang lainnya.” Pembeneran sikap kemanusiaan yang adil dan beradap dimaknai dengan tindakan yang tidak membedakan secara interpersonal dalam manajemen perusahaan antara bagian manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas dalam

perusahaan. Karena padahakekatnya manusia diciptakan sama dan sederajat oleh Allah SWT. maka dari itu orang yang memiliki kekuasaan sebaiknya menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana dan tidak semena-mena.

Dengan demikian pemaknaan sebuah nilai kemanusiaan dalam kehidupan para akuntan sangat penting sekali, baik dalam menjalankan aktivitas profesinya maupun berhubungan dengan sesama akuntan lainnya. Dengan pemaknaan nilai pancasila berkemanusiaan didapatkan sebuah akuntan yang berintegritas dan profesionalitas tinggi dalam menghadapi segala situasi dan kondisi di lapangan.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, Ludigdo dan Kamayanti (2012:164) dalam artikelnya menyatakan bahwa “Dalam Islam, peradaban berkaitan erat dengan kesatuan, untuk mencapai perdamaian dunia (Faruqi 1998). Sekali lagi, ini berarti bahwa prinsip kedua mengarah kembali ke prinsip pertama percaya kepada satu Tuhan. Peradaban tidak mengakui keilahian berdasarkan imperialisme yang tidak adil. Jika prinsip kedua dikombinasikan dengan prinsip ketiga, yang merupakan Kesatuan Indonesia, maka peradaban masih harus mengedepankan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dalam rangka untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, bangsa harus menjaga martabatnya (Soerjaningrat 1967, hal. 99).” Keadilan dan kebersamaan akan memupuk sifat persatuan antar warga negara Indonesia. Sifat komersial dari diri seorang akuntan sebaiknya diminimalisasi atau dikesampingkan terlebih dahulu agar tidak menguasai dirinya sendiri dan berakibat buruk bagi persatuan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Pernyataan pertama mengenai sila ketiga pancasila disampaikan oleh Tri Susanti Wulandari, SE. (salah satu mahasiswa lulusan sarjana akuntansi Universitas Jember) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya dengan

berlandaskan kepada sila ketiga ini sangat penting juga untuk melaksanakan dalam setiap tindakan para akuntan untuk tetap berlandaskan kepada rasa persatuan antara rakyat Indonesia dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, atau budaya didalam setiap tindakan yang dilakukan.” Dengan tindakan seperti ini akan menumbuhkan sebuah pemahaman bahwa arasa persatuang sangat penting artinya untuk memaknai sebuah kehidupan para akuntan. Akuntan sudah pastilah akan berhubungan dengan berbagai pihak dalam karirnya, maka dari itu dengan rasa persatuan seorang akuntan akan memiliki banyak relasi dan kerjasama baik dengan klien maupun dengan sesama akuntan.

Pernyataan juga disampaikan oleh Resha Dwi Ayu P.M., SE. (salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Airlangga) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya, relevansi praktik akuntan jika dilihat dari sudut pandang butir sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia para akuntan didalam praktiknya harus menjunjung tinggi nilai – nilai luhur pancasila seperti pada sila ketiga ini dimana segala perbuatan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para akuntan harus menjunjung tinggi kepentingan bersama tanpa harus merugikan salah satu pihak dan memecah belah salah satu kelompok yang terkait dengan praktik akuntansi seperti kelompok investor, audetee atau stakeholders lainnya. Oleh sebab itu harus dapat membuat segala bentuk praktiknya didalam koridor kepentingan bersama.” Sikap keadilan muncul kembali dalam pemaknaan sila ketiga ini, karena dengan adanya sikap yang adil akan menghasilkan sebuah persatuan diantara sesama profesi akuntan. Dengan tidak membedakan satu diantara lainnya, maka berbagai pihak akan merasa lebih diharagai oleh sikap keprofesionalan para akuntan.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ida Subaida, SE. (salah satu asisten tenaga pengajar di Sekolah

Tinggi Agama Islam Situbondo) yang menyatakan bahwa “Relevansi parktik akuntan juga tercermin dalam sila ke 3 yaitu persatuan indonesia dalam hal keteraturan lingkungan dan sosial. Praktik akuntan dewasa ini telah marak memasukkan unsur Corporate Social Responsibility (CSR). CSR tersebut telah terbukti dari berbagai penelitian ilmiah bahwa dapat menambah keuntungan bagi perusahaan baik secara eksplisit maupun implisit, baik yang dapat dirasakan jangka pendek, menengah, atau panjang. Dengan adanya CSR tersebut, misalnya dalam hal pemberian beasiswa pendidikan pada masyarakat kurang mampu dalam hal ekonomi yang bertempat tinggal di sekitar lokasi usaha, akan dapat menumbuhkan rasa persatuan yang tercermin dakam rasa ikut menjaga kelancaran kegiatan operasional, ikut menjaga nama baik, setia menjadi pelanggan tetap perusahaan, dan lain-lain sebagai bentuk terimakasih mereka atas beasiswa yang mereka atau kerabat mereka peroleh dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi persatuan Indonesia dalam sila ketiga juga dapat tercapai.” Salah satu perwujudan rasa kesatuan dan persatuan dari perusahaan adalah melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan kegiatan perusahaan berunsur kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dengan tindakan ini diharapkan perusahaan juga tidak memikirkan keuntungan pribadinya tetapi juga melakukan pensaluran sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial masyarakat Indonesia. Pengembangan pelaporan yang berbasis CSR ini juga mulai diterapkan dalam praktik akuntan untuk menyajikannya dalam laporan keuangan yang menjadi keunggulan kompetitif sebuah perusahaan.

Pernyataan yang terakhir disampaikan oleh Diajeng Ade Sakina, SE. (salah satu staf Departemen Purchasing PT. Nestle Indonesia) yang menyatakan bahwa ” Menurut pendapat saya dengan sila 3 direfleksikan dengan pekerjaan saya adalah saya akan diberi

landasan kepada setiap tindakan saya untuk mengutamakan persatuan sesama pekerja didalam perusahaan. tidak melakukan tindakan yang memecah belah antar pekerja. Setiap pencatatan pembelian yang saya lakukan dengan tindakan jujur diharapkan akan menumbuhkan kerjasama yang solid antar departemen dalam perusahaan. Dengan laporan tersebut perusahaan akan menganalisis besarnya beban pembelian yang terjadi. Sehingga dengan pencatatan secara jujur akan memperlihatkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Keadaan ini akan menumbuhkan sikap dan komitmen solid dalam perusahaan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan para akuntan juga harus memiliki rasa persatuan dan kerjasama supaya pekerjaan yang dilaksanakannya akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan dengan sebaik mungkin baik bagi kehidupan pribadinya maupun sosial dengan masyarakat.

Dengan demikian sikap persatuan muncul dari adanya sikap berkeadilan kepada kehidupan bersosial. Sikap berkeadilan memang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi dengan niat dan usaha yang semaksimal mungkin pasti akan setidaknya memunculkan sikap yang adil dan tidak menonjolkan kepentingan pribadi saja. Kehidupan yang sangat indah merupakan kehidupan yang dapat tercipta dari sebuah persatuan dan kedamaian. Begitu juga dalam setiap diri para akuntan, maka dalam menjalankan pekerjaan dapat merasakannya dengan *enjoy* jika dalam pekerjaannya mengutamakan persatuan dan kemaslahatan kehidupan bersama dengan konsep keadilan yang sepenuhnya.

Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Nilai yang dapat diambil adalah para akuntan harusnya menjadi professional yang bijaksana dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Seorang akuntan yang bijaksana akan mengatakannya

dengan jujur dan tidak menutupi setiap permasalahan ketika dia berhadapan dengan kliennya. Jujur berarti mengharuskan para akuntan untuk mengatakan “jelek” jika keadaannya secara nyata memang jelek dan mengatakan “bagus” jika keadaannya secara nyata memang bagus. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ludigdo (2012: 27) yang menyatakan bahwa “Perlu dipahami kembali bahwa dalam cara pandang Pancasila, prinsip musyawarah mufakat tidak menghendaki situasi di mana suatu keputusan didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik dan pengusaha, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi ini didikte oleh kekuatan dari luar negeri atau kekuatan industri pasar modal global yang dikuasai oleh korporat multinasional yang secara halus bersifat mendominasi atau menghegemoni (lihat Rodrigus dan Craig, 2007). Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan haruslah merupakan aktualisasi dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan cita-cita kebangsaan (Latif, 2011; 45).” Jadi seorang akuntan tidak boleh dikuasai dengan keinginan korporat untuk memenuhinya. Tetapi seorang akuntan harus menunjukkan sikap dan komitmennya yang selalu menjunjung tinggi integritas profesinya.

Pernyataan juga datang dari Tri Susanti Wulandari, SE. (salah satu mahasiswa lulusan sarjana akuntansi Universitas Jember) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya seorang akuntan harus bijaksana dalam mengambil setiap tindakannya dengan melaksanakan musyawarah secara adil dan membebaskan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia.” Dengan sikap bijaksana dan mewujudkan kebebasan bekerjasama dengan sesama rekan seprofesi akan menumbuhkan sikap saling bersatu satu sama lainnya.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Resha Dwi Ayu P.M., SE. (salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Airlangga) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya, relevansi praktik akuntan jika dilihat dari sudut pandang butir sila ke-4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan maksudnya adalah didalam praktik akuntansi tidak bekerja secara individu pasti ada tim didalamnya biasanya terdapat salah satu pemimpin tim untuk dapat mengkoordinasi anggota timnya untuk dapat bekerja secara profesional tanpa ada kepentingan pribadi di atasnya. Jika terdapat suatu kendala yang tidak dapat dipecahkan masalahnya didalam praktiknya, hendaknya dapat dilakukan secara musyawarah didalam tim tanpa harus melanggar kode etik profesi akuntan atau aturan yang mengikatnya. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapat dapat memberikan kesimpulan atau opini yang baik untuk kepentingan klien ataupun stakeholder yang berkaitan.” Semangat kebersamaan dalam tim para akuntan dapat diwujudkan dengan kebijaksanaan yang setinggi mungkin. Seorang pimpinan tim akan lebih dihargai ketika kepemimpinan yang dilaksanakannya memiliki kebijaksanaan yang tinggi.

Pendapat yang lainnya disampaikan oleh Ida Subaida, SE. (salah satu asisten tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Situbondo) yang menyatakan bahwa “bisa dalam bentuk perumusan standar akuntansi yang biasanya dilakukan oleh DSAK. DSAK dituntut mampu membuat keputusan mengenai standar akuntansi bagaimana yang harus diterapkan oleh entitas di seluruh Indonesia. Keputusan yang diambil dituntut merupakan benar-benar hasil dari musyawarah seluruh anggota DSAK dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan praktik akuntan seluruh Indonesia, tidak memihak, harus dapat menjadikan praktik akuntan di Indonesia menjadi lebih baik agar dapat bersaing dengan

negara lain, harus lebih banyak manfaat dari pada biayanya dalam melaksanakan praktik akuntan itu sendiri, dan lain sebagainya. Atau juga bisa terermin dalam penentuan metode-metode akuntansi dan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan. Akuntan diharapkan mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap perusahaan dari berbagai alternatif metode dan kebijakan yang ada. Dan pengambilan keputusan tersebut juga harus merupakan hasil dari musyawarah pihak-pihak yang terkait.” Selain aktivitas akuntan sebagai pembuatan laporan keuangan tetapi sebenarnya juga dapat ditarik lagi lebih luas yaitu sebagai pembuat standar akuntansi yang dihasilkan dari proses musyawarah yang mencapai kata mufakat. Kemufakatan ini juga perlu ditelaah kebermanfaatannya bagi kehidupan sosial masyarakat dengan dampak yang diakibatkan dari adanya praktik akuntansi di tengah kehidupan masyarakat.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Diajeng Ade Sakina, SE. (salah satu staf Departemen Purchasing PT. Nestle Indonesia) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya jika sila 4 direfleksikan dengan pekerjaan saya maka bagian yang saya tempati sekarang membawahi pelaksana pembelian, maka dengan keadaan seperti ini bagian saya harus melaksanakan kepemimpinan yang bijaksana dengan melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan peraturan perusahaan. Jika terdapat permasalahan dalam bagian saya maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah yang mencapai kata mufakat. Dengan tindakan yang berlandaskan kepada sila ke 4 Pancasila ini akan dimaknai dengan tindakan yang telah tersebut sebelumnya. Dengan demikian, maka kerja perusahaan akan semakin solid dan berkembang satu sama lainnya.” Kepemimpinan yang bijaksana akan melahirkan sifat persatuan dan kesatuan dalam kepemimpinannya. Begitu pula

dengan praktik akuntansi dalam sebuah perusahaan, dengan kekuasaan untuk pengungkapan dalam laporan keuangan, seorang akuntan diharapkan tetap berlaku bijak dalam melakukan pencatatan sebuah transaksi, jika transaksi tidak ada relevansinya dengan kegiatan perusahaan sebaiknya seorang akuntan tersebut mendiskusikannya terlebih dahulu dengan rekan sepekerjaannya dalam perusahaan, supaya dapat diputuskan mengenai pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Seorang akuntan yang bijaksana akan melakukan tindakan dengan memperhatikan kepentingan umum. Penyelesaian sebuah permasalahan melalui jalur musyawarah dengan tim anggota profesi akuntan maka akan mempersolid kinerja dalam sebuah organisasi. Pemaknaan sila keempat ini sangatlah penting artinya dalam pengambilan setiap tindakan dalam profesi akuntan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Sila kelima sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial yang harus dilaksanakan oleh para akuntan baik dalam membuat standar akuntansi maupun praktek dalam pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kamayanti (n.d.:12) yang menyatakan bahwa “akuntansi yang sangat berorientasi pada laba merupakan hal yang tidak Pancasilais karena tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pernyataannya mengkritisi akuntansi saat ini sangat baik sekali, karena memang dipandang akuntansi saat ini masih sangat berorientasi sekali terhadap laba yang dihasilkan. Contohnya saja pada saat ini masih banyak perusahaan yang menjadikan patokan laba untuk memberikan bonus kepada para karyawannya. Keadaan seperti ini mengakibatkan tindakan oportunistik para manajer dan akuntan untuk melakukan manajemen laba dalam kegiatannya dalam perusahaan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Tri Susanti Wulandari, SE. (salah satu mahasiswa lulusan sarjana akuntansi Universitas Jember) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya dengan nilai Pancasila 5 ini diharapkan para akuntan untuk melakukan keadilan dalam setiap tindakan yang akan dilaksanakannya. Dengan tindakan adil maka juga akan menciptakan sebuah persatuan antar warga negara Indonesia. Pelaksanaan tindakan ini dapat dilakukan dengan mengambil keputusan yang tidak berperspektif kepada salah satu kelompok saja, misalnya investor atau manajemen. Seorang akuntan pada nantinya harus melaksanakan tugasnya dengan seadil-adilnya.” Pernyataan tersebut menggambarkan secara jelas mengenai keadilan yang harus dilakukan oleh para akuntan kepada kehidupan sosial dengan masyarakat. Tindakan ini dapat diwujudkan dengan tidak membedakan klien yang sedang membutuhkan keahliannya. Tidak hanya perusahaan yang besar yang dilayaninya tetapi perusahaan kecilpun harus dilayaninya dengan tidak mengedepankan besar *fee* yang akan didapatkannya.

Pernyataan yang selanjutnya disampaikan oleh Resha Dwi Ayu P.M., SE. (salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Airlangga) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya, relevansi praktik akuntan jika dilihat dari sudut pandang butir sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa ketika para akuntan melakukan tindakan yang menyerupai keterampilannya misalkan melakukan pemeriksaan laporan keuangan harus dapat memenuhi kaidah yang ada, laporan keuangan yang dibuat kemudian diperiksa diharapkan dapat memenuhi permintaan klien dan stakeholders yang berkepentingan didalamnya tanpa harus melakukan kecurangan yang ada. Laporan keuangan harus benar-benar memenuhi kebutuhan semuanya, dan para akuntan harus secara adil tidak menyalahgunakan

wewenangannya seperti berpihak pada satu kepentingan. Dan harus digaris bawahi adalah para akuntan harus bekerja secara profesional, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi didalam melakukan praktiknya agar tidak mengurangi sifat independensinya.” Ketidak berpihakan ini akan menunjukkan sikap yang beretika tinggi dalam profesi akuntan. Tindakan beretika yang dilandaskan pada nilai pancasila berkeadilan sosial akan memantapkan moral dan mental para akuntan dalam bertindak.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ida Subaida, SE. (salah satu asisten tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Situbondo) yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi adalah jamak. Dalam artian tidak hanya satu pihak dan tidak boleh cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tertentu. Jadi bagaimana caranya agar informasi akuntansi selaku output dalam praktik akuntansi dapat tersaji secara netral tanpa memihak salah satu pihak. Meskipun ada pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan seperti perwakilan investor utama atau pihak lainnya. Hal tersebut tidak boleh mempengaruhi praktik akuntan untuk menjadi cenderung memihak inverstor utama tersebut. Jadi semua pihak yang berkepentingan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, harus dianggap sama. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh praktik akuntan bagaimana caranya harus mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan. Dengan begitu para pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan perusahaan akan tetap dapat terus mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Sejalan dengan itu tujuan negara yang tercermin dalam pancasila sila ke 5 juga dapat tercapai. Jadi dalam poin ini jelas, bahwa parktik akuntan sayang sejalan dan memberikan relevansi terhadap butir sila ke 5.”

Perefleksian nilai keadilan yang tidak membedakan antar pemakai laporan keuangan akan menghasilkan sebuah keselarasan dan kebermerataan dalam penyampaian laporan keuangan. Keselarasan dan kebermerataan ini maksudnya adalah setiap pihak yang berkepentinga akan diberikan informasi akuntansi secara sama dan merata, tidak ada yang dibedakan satu sama lainnya.

Pernyataan terakhir disampaikan oleh Diajeng Ade Sakina, SE. (salah satu staf Departemen Purchasing PT. Nestle Indonesia) yang menyatakan bahwa “Menurut pendapat saya jika di refleksikan dengan nilai pancasila ke lima ini maka akan didapatkan sebuah makna bahwa setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam hal penjualan produk atau pembelian bahan baku dari alam, maka perusahaan harus menerapkan kinerja *Good Corporate Governance* yang tetap mempedulikan kepentingan sosial dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu karena produksi utama perusahaan adalah susu, maka juga perusahaan harus menerbitkan produk yang berkualitas tinggi demi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan melakukan tindakan seperti ini maka perusahaan saya berlandaskan kepada sila 5 ini.” Konsep aktualisasi laba dalam akuntansi juga seharusnya diimbangi dengan kegiatan yang juga dapat memberikan laba bagi kehidupan sosial.

Sila kelima ini mengindikasikan bahwa seorang akuntan harus bersikap adil daalam kehidupan bersosial. Pembuat standar akuntansi juga harus tetap memikirkan dampak sosial akan setiap standar baru yang dikeluarkan. Standar-standar akuntansi ini juga harus mencerminkan nilai-nilai pencasila didalamnya terutamanya dengan tidak berperspektif terhadap laba saja, tetapi juga berperspektif kepada penghasilan laba juga kepada kehidupan bersosial. Sehingga masyarakat juga ikut merasakan nilai tambah (*value added*)

dari kehadiran sebuah perusahaan dilingkungannya.

Kelima nilai luhur yang dimiliki oleh Pancasila ini harus dapat menjadi landasan pada setiap tindakan para akuntan. Nilai yang telah dibangun oleh founding fathers negara Indonesia ini haruslah tetap abadi dibenak semua warga negara Indonesia tak terkecuali para akuntan. Nilai luhur Pancasila ini memiliki banyak kelebihan jika diterapkan secara seksama dalam kehidupan para akuntan. Karena dengan nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan, seorang akuntan akan lebih memiliki integritas dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Sehingga para akuntan tidak hanya berpandangan kehidupan didunia saja tetapi juga berpandangan pada kehidupan yang selanjutnya yaitu kehidupan akhirat yang diyakini merupakan kehidupan yang lebih kekal kelak.

KESIMPULAN

Pancasila yang merupakan landasan dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki nilai-nilai luhur yang sangat kompleks. Tidak hanya nilai luhur berkehidupan secara horizontal tetapi juga secara vertikal. Nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila tidak hanya sebatas interaksi atau berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan sang maha pencipta yaitu Allah SWT. Nilai luhur ketuhanan sangat diyakini bahwa setiap tindakan dari seorang individu akan selalau diawasi dan dicatat oleh Allah SWT. Keyakinan inilah yang akan membentuk karakter (*character building*) kecintaan terhadap perbuatan terpuji, karena hanya perbuatan terpujilah yang Allah SWT. cintai dari para hambanya. Allah SWT. akan membalas perbuatan setiap hambanya setimpal dengan apa yang telah dikerjakannya.

Profesi akuntan juga sangat perlu untuk menerapkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Pancasila ini. Baik nilai secara horizontal maupun vertikal.

Profesi akuntan akan sangat dekat sekali dengan perbuatan terpuji dan tercela. Profesi akuntan baik sebagai pegawai dalam perusahaan maupun menjadi seorang akuntan publik yang menilai pelaporan keuangan suatu perusahaan akan terdapat dua pilihan jalan kehidupan. Jalan pertama adalah berbuat jujur dan adil atas apa yang dikerjakannya atau jalan kedua adalah berbuat curang atau melakukan manipulasi atas pekerjaannya. Jika seorang akuntan memilih jalan pertama, maka dia akan menciptakan suatu kemaslahatan bagi sesama umat dan mendapatkan banyak pahala dari Allah SWT. Sebaliknya jika seorang akuntan memilih jalan kedua, maka seorang akuntan tersebut akan menciptakan suatu kehancuran bagi sesama umat dan mendapatkan dosa yang besar dari Allah SWT. Dengan keadaab demikian yang mengingat profesi akuntan sangat dekat dengan perbuatan terpuji dan tercela, sehingga perlunya untuk memperkuat nilai-nilai luhur yang ada didalam Pancasila. Pengokohan nilai luhur Pancasila akan menghindarkan seorang akuntan dari perbuatan tercela tersebut. Selain itu sifat integritas seorang akuntan akan semakin kuat dan solid yang menciptakan perbuatan yang penuh etika dan moral dalam setiap tindakan para akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hanapiah, P. 2002. Pendidikan Pancasila. Bandung: FISIP UNPAD
- Kamayanti, A. n.d. Cinta: Tindakan Berkesadaran Akuntan (Pendekatan Dialogis Dalam Pendidikan Akuntansi). Malang: Universitas Brawijaya
- Ludigdo, U. n.d. Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Ludigdo, U. dan Kamayanti, A. 2012. Pancasila as Accountant Ethics

- Imperialism Liberator. World Journal of Social Sciences
- Mulawarman, A.D. n.d. Pendidikan Akuntansi Indonesia: Pro Neoliberal Atau Pancasila?. Malang: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Mulyono. n.d. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
- Nuraini, N. 2006. Pancasila Sebagai Filsafat Hukum dan Etika Hukum Bagi Masyarakat Pelaku Bisnis Indonesia: Landasan Cita-Hukum Bisnis Yang Berkeadilan. Jurnal Bisnis, Manajemen, & Ekonomi
- Rahmatullah. 2008. Pendidikan Pancasila. Makasar: Laporan Modul Pembelajaran Berbasis SCL
- Buku**
- Ludigdo. U. 2012. Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia Dengan Pancasila. Malang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Etika Bisnis dan Profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Intenet**
- Ketinggalan.files.wordpress.com/2010/11/pengertian-pancasila